

Analisis Komposisi Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Lebak

Dede Suharna* Liesna Halimutusa Bambang P Purwoko*****

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

*** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

| Article Info | Abstract |
|--|--|
| <p>Keywords: <i>Composition of the Development Budget, Locally-generated revenue.</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: karangmunggaran@gmail.com liesna.halimutusa@gmail.com</p> | <p><i>Regional development as part of national development is essentially an effort to increase the capacity of regional growth and which will generate revenue growth areas, especially revenue. Revenue swampy district is still larger transfers from central funds as grants. Composition of the Development expenditure that budgeting is directly affected by the program or activity is expected to increase local revenue growth. Besides the fiscal decentralization brings more benefits for the regions to manage their own fiscal capacity. This study examined the impact of the composition of the development budget to the revenue growth in the district swampy area using the case study method. The population in this study is Lebak district budget with sample budget and realization of the budget year 1999-2009, a technique using linear regression analysis. This study found that the composition of the development budget has a negative impact on revenue growth. The coefficient of determination variable X does not provide significant effect on variable Y. The results of the analysis obtained by the composition of the development budget does not influence or no significant effect on local revenue growth of Lebak.</i></p> <p>Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah dan yang nantinya akan</p> |

menghasilkan pertumbuhan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah kabupaten lebak saat ini masih lebih besar transfer dana dari pusat dalam bentuk dana perimbangan. Komposisi belanja pembangunan yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Selain itu desentralisasi fiskal membawa keuntungan lebih bagi daerah untuk mengelola kapasitas fiskal mereka sendiri. Penelitian ini menguji dampak komposisi anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di kabupaten lebak dengan menggunakan metode case study. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Lebak dengan sampel APBD dan realiasi APBD tahun 1999-2009, teknik analisa menggunakan regresi linier. Penelitian ini menemukan bahwa komposisi anggaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan pendapatan. Koefisien determinasi variabel X tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel Y. Hasil analisis diperoleh komposisi anggaran pembangunan tidak memberikan pengaruh atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lebak.

Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kesempatan besar kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom.

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini di Kabupaten Lebak belum terjadi pemerataan di semua wilayah baik perkotaan dan perdesaan. Untuk terwujudnya pemerataan pembangunan daerah perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Kebijakan dapat diarahkan pada kegiatan wilayah yang cepat tumbuh serta kawasan strategis dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja langsung (belanja modal) merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja langsung dalam APBD untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Alokasi belanja langsung ini didasarkan pada program dan kegiatan pemerintah daerah yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintahan

Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri (desentralisasi) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh komposisi anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Lebak?

Saragih (2003) mengatakan bahwa secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 16 menyebutkan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi yaitu: (a) Fungsi Stabilitas; (b) Fungsi Alokasi; (c) Fungsi Distribusi; (d) Fungsi Regulasi.

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Darise (2009) mengatakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (g) Pajak Parkir.

Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 mengemukakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang penggunaannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode *case study* dimana penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, verifikatif dan *field research*. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten Lebak. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa anggaran pembangunan (belanja langsung) dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun 1999 – 2009. Data dianalisis dengan menggunakan metode statistik inferensial adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komposisi Anggaran Pembangunan

Tabel 1.

Komposisi Anggaran Belanja Pembangunan atau Belanja Langsung

| No. | Uraian | Komposisi Belanja Pembangunan/ Belanja Langsung | (%) |
|---------------------------|------------|--|--------------|
| 1 | Tahun 1999 | 52,496,624,440.00 | 52.00 |
| 2 | Tahun 2000 | 46,598,154,200.00 | 52.00 |
| 3 | Tahun 2001 | 60,750,000,000.00 | 25.00 |
| 4 | Tahun 2002 | 75,831,883,212.00 | 28.74 |
| 5 | Tahun 2003 | 183,827,256,540.00 | 53.84 |
| 6 | Tahun 2004 | 232,644,785,030.00 | 66.51 |
| 7 | Tahun 2005 | 179,006,158,611.00 | 42.10 |
| 8 | Tahun 2006 | 448,528,732,943.00 | 68.97 |
| 9 | Tahun 2007 | 430,585,880,989.00 | 56.43 |
| 10 | Tahun 2008 | 420,565,946,716.00 | 48.62 |
| 11 | Tahun 2009 | 405,641,438,550.00 | 45.85 |
| Rata-Rata Pertahun | | | 49.10 |

Sedangkan anggaran belanja daerah dari tahun 1999-2009 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2.
Anggaran Belanja Daerah Kaupaten Lebak Tahun 1999-2009

| No | Tahun | Anggaran Belanja Daerah |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 1999 | 100,955,047,000 |
| 2 | 2000 | 89,611,835,000 |
| 3 | 2001 | 243,365,965,000 |
| 4 | 2002 | 263,887,265,000 |
| 5 | 2003 | 341,417,390,570 |
| 6 | 2004 | 349,780,368,220 |
| 7 | 2005 | 425,209,537,199 |
| 8 | 2006 | 650,309,187,962 |
| 9 | 2007 | 762,978,452,548 |
| 10 | 2008 | 865,014,223,146 |
| 11 | 2009 | 884,755,439,332 |

Dari tabel diatas maka dapat diperoleh komposisi belanja pembangunan dalam bentuk persentase setiap tahunnya dengan cara belanja pembangunan tahun bersangkutan dibagi dengan anggaran belanja daerah (tabel 2) tahun tersebut dikali seratus persen. Hasil pengumpulan data menunjukan komposisi anggaran pembangunan tahun 1999 sebesar Rp. 52.496.624.440,- tahun 2000 sebesar Rp. 46.598.154.200,- tahun 2001 sebesar Rp. 60.750.000.000 tahun 2002 sebesar Rp. 75.831.883.212,- tahun 2003 sebesar Rp. 183.827.256.540,- tahun 2004 sebesar Rp. 232.644.785.030,- tahun 2005 sebesar Rp. 179.006.158.611,- tahun 2006 sebesar 448.528.732.943,- tahun 2007 sebesar Rp. 430.585.880.989,- tahun 2008 sebesar Rp. 420.565.946.716 tahun 2009 sebesar Rp. 405.641.438.550,-. Sedangkan jumlah komposisi anggaran pembangunan dari tahun 1999-2009 yaitu sebesar Rp. 2.536.476.861.231,- dan rata-rata komposisi anggaran pembangunan sebesar Rp. 230.588.805.566,-.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Perhitungan pertumbuhan pendapatan setiap tahun diperoleh dengan menggunakan cara pendapatan tahun yang dihitung dikurangi pendapatan tahun sebelumnya dibagi pendapatan tahun sebelumnya dikali seratus persen. Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 1999 sebesar Rp. 105.739.202.000,- tahun

2000 sebesar Rp. 94.479.210.000,- tahun 2001 sebesar Rp. 472.271.168.000,- tahun 2002 sebesar Rp. 273.852.662.000,- tahun 2003 sebesar Rp. 335.065.183.671,- tahun 2004 sebesar Rp. 337.204.818.900,- tahun 2005 sebesar Rp. 398.813.049.137,- tahun 2006 sebesar Rp. 595.141.121.259,- tahun 2007 sebesar Rp. 688,321,895,179,- tahun 2008 sebesar Rp. 805.516.579.920,- tahun 2009 sebesar Rp. 823.089.133.098,- dari kurun waktu 11 (sebelas) tahun yaitu tahun 1999-2009 pada tabel 3 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2000 mengalami penurunan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah per tahun adalah sebesar 29,14%.

Tabel 3.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah

| No. | Uraian | Pendapatan | Pertumbuhan Pendapatan(%) |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Tahun 1999 | 105,739,202,000 | 35.69 |
| 2 | Tahun 2000 | 94,479,210,000 | (10.65) |
| 3 | Tahun 2001 | 247,271,168,000 | 161.72 |
| 4 | Tahun 2002 | 273,852,662,000 | 10.75 |
| 5 | Tahun 2003 | 335,065,183,671 | 22.35 |
| 6 | Tahun 2004 | 337,204,818,900 | 0.64 |
| 7 | Tahun 2005 | 398,813,049,137 | 18.27 |
| 8 | Tahun 2006 | 595,141,121,259 | 49.23 |
| 9 | Tahun 2007 | 688,321,895,179 | 15.66 |
| 10 | Tahun 2008 | 805,516,579,920 | 2.18 |
| 11 | Tahun 2009 | 823,089,133,098 | 14.73 |
| Rata-Rata Pertahun | | | 29.14 |

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Hasil penelitian menemukan bahwa Persamaan regresi adalah sebagai berikut: $Y = 109,14 + (-1,63)X$. Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi

yang telah diperoleh maka dapat dibuat suatu interpretasi terhadap model sebagai berikut : komposisi anggaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan pendapatan, yang terlihat pada persamaan regresi yang diperoleh yaitu $Y = 109,14 + (-1,63) X$, artinya jika terjadi kenaikan sebesar 1 terhadap komposisi anggaran pembangunan maka akan terjadi penurunan sebesar $1 \times 1,63$ terhadap pertumbuhan pendapatan.

Koefisien penentu atau koefisien determinasi memiliki nilai negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 1,59 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu taraf nyata (α) dengan nilai t tabel $\alpha = 5\% = 0.05$, $\frac{\alpha}{2} = 0,025$ db $= 11-2 = 9$ $t_{0,025(9)} = 2,20$ dan nilai korelasi antara variabel X terhadap Y sebesar 0,22 atau 22%, dan sisanya sebesar 78 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan ke dalam model estimasi. Hal ini berarti komposisi anggaran pembangunan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lebak. Maka hipotesa semakin besar komposisi anggaran pembangunan maka semakin besar pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lebak ditolak.

Simpulan

Berdasarkan latar belakang, teori-teori yang berkaitan, dan pembuktian hipotesis melalui data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan metode ilmiah yang sesuai, serta analisis pembahasan dari hasil pengujian, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hasil pengumpulan data menunjukkan komposisi anggaran pembangunan dari tahun 1999-2009 yaitu sebesar Rp. 2.536.476.861.231,- dengan rata-rata komposisi anggaran pembangunan sebesar Rp. 230.588.805.566,-.
2. Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 1999-2009 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2000

mengalami penurunan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah per tahun adalah sebesar 29,14%.

3. Komposisi anggaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan pendapatan, koefisien determinasi diperoleh 22% yang berarti variabel X tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel Y. Dengan menggunakan uji t maka diperoleh uji t lebih kecil dari t hitung yang berarti komposisi anggaran pembangunan tidak memberikan pengaruh yang nyata atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lebak. Maka hipotesa semakin besar komposisi anggaran pembangunan maka semakin besar pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lebak ditolak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah seagai berikut :

1. Analisis data yang telah dilakukan maka diharapkan pemerintah daerah kabupaten lebak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansial dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak dan retribusi.
2. Pergeseran komposisi belanja dapat dilakukan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan pendapatan. menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Merumuskan kembali sistem penetapan alokasi belanja dan perolehan pendapatan daerah terutama PAD sehingga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.

- Boediono, Wayan Kostar. 2001. *Statistika dan Profitabilitas*. Bandung: PT. Remaja Ros Dakary
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Harun, Hamruli. 2004. *Analisis Peningkatan PAD*. Yogyakarta : BPFE
- Hasan, M Iqbal. 1999. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jhingan, M L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Lewis, Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mulyani, Sri. 2003. *Statistika Untuk Ekonomi Edisi ke Dua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Suandi, Erly. 2008. *Hukum Pajak Edisi ke Empat*. Jakarta: Salemba
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 2009. *Statistika Teori dan Aplikasi Edisi ke Tujuh*. Jakarta: Erlangga

Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423.